

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI SEINDONESIA

Retno Dwijayanti

Alumni Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta
E-mail: Retnodwijayanti22@gmail.com

Rusherlistyanti

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta
E-mail: Herlissantosa@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims at determining the comparative analysis of the financial performance of the provincial governments in Indonesia and determines whether there are differences in the financial performance of the provincial governments in Indonesia based on self-sufficiency ratio, the ratio of PAD effectiveness, efficiency ratios, activity ratios, and growth ratios.

The data used in this study is a secondary data is the 2008-2010 Regional Financial Statements at 33 provinces in Indonesia. The data is taken from the official website www.djpk.depkeu.go.id General Director of Fiscal Balance and the Central Bureau of Statistics (BPS). Analysis techniques used in this research is the analysis of financial ratios and analysis of financial performance of the different test, if the data were normally distributed and are eligible One Way ANOVA test, then the researcher would use One Way ANOVA test. Conversely, if the data are not normally distributed, the researcher would use the Kruskal Wallis test.

The analysis revealed comparative financial performance of provincial governments in Indonesia 2008-2010 period based on ratio analysis rated the independence of East Java first. Effectiveness ratio analysis results PAD rated first province of West Papua. The results of the efficiency ratio analysis Bali Province rated first. The results of the activity ratio analysis routine and development expenditures West Sulawesi prioritize development expenditure compared to regular shopping. Results of analysis of 2009 growth rate PAD province in Indonesia has decreased from the previous year. Earnings growth ratio DI Jogjakarta and Gorontalo Province has increased from 2008-2010, instead of West Sumatra, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, Southeast Sulawesi and West Papua and other provinces decreased fluctuate. Routine expenditure growth ratio Bengkulu province and Jakarta has increased from 2008-2010, instead of North Sumatra, Riau, Jambi, Bangka Belitung, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, Central Sulawesi, Maluku and Papua and other provinces decreased fluctuate. The ratio of development expenditure growth Aceh province, Jambi, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, Central Kalimantan, Central Sulawesi, West Sulawesi and West Papua has increased from 2008-2010, instead of North Sumatra, Lampung, East Nusa Tenggara, South Sulawesi and Papua and other provinces decreased fluctuate. Kruskal Wallis test results different that there is no significant difference in the financial performance of the provincial government as seen from the 2008-2010 period Indonesi efficiency ratio, revenue growth, revenue growth, growth in routine expenditure and development expenditure growth, so that the others there is a difference.

Keywords: Financial Performance, Independence, PAD Effectiveness, Efficiency, Activity, Growth.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi).

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Ekawarna. S. U, Sam. I dan Rahayu. S (2009) bahwa kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan

dengan bagaimana unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas/ pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Susantih dan Saftiana (2009) pada penelitiannya yang berjudul Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian, efektivitas dan aktivitas keuangan daerah pada lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 63,81 persen dan Propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Hasil analisis kemandirian menunjukkan bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 50,11 persen begitu juga dengan analisis efektivitas keuangan daerah Propinsi Lampung berada diperingkat tertinggi yaitu 132,17 persen. Hasil analisis aktivitas keuangan daerah berdasarkan keserasian keuangan daerah menunjukkan bahwa Propinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terendah yaitu 32,43 persen dan nilai rasio pelayanan publik tertinggi yaitu 40,52 persen. Sementara itu, hasil analisis uji beda *Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan secara rata-rata nilai *asympt sig* sebesar

0,859, hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

Penelitian ini mengambil objek yang berbeda yaitu pada propinsi se-Indonesia dengan tahun penelitian 2008-2010. Pemilihan propinsi se-Indonesia sebagai objek penelitian, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota di Indonesia bagian Barat dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur. Termasuk kemampuan setiap daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kegiatannya masih rendah. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi kepada pemerintah pusat untuk membangun sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, perkembangan antara barat dan timur berbeda. Sedangkan untuk pemilihan tahun penelitian yaitu tahun 2008-2010, dikarenakan pada tahun 2008 terjadi krisis global dan Indonesia merasakan dampak dari krisis global tersebut. Waktu pengamatan dilakukan selama tiga tahun karena untuk melihat keuangan daerah propinsi se-Indonesia setelah terjadinya krisis global pada tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan fakta dan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan sebagai alat analisis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010?

1.3 Tujuan Penelitian

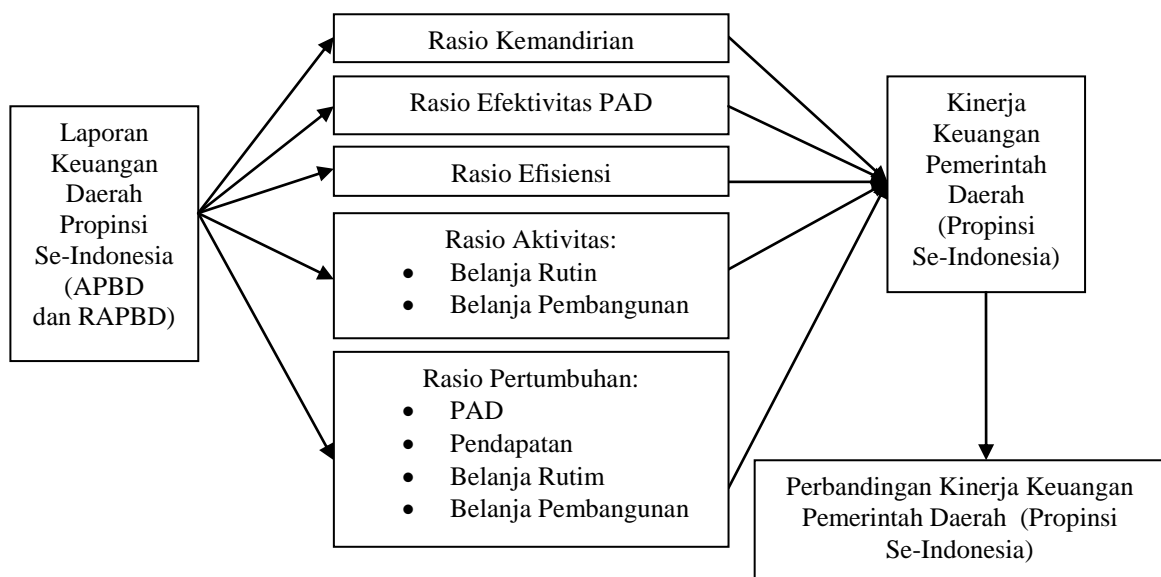
1. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
2. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

GAMBAR 1
Kerangka Konseptual



2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan tingkat kemandirian pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H2: Terdapat perbedaan tingkat efektivitas pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H3: Terdapat perbedaan tingkat efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H4: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja rutin pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H5: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja pembangunan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H6: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PAD pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H7: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H8: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan belanja rutin pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.
- H9: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan belanja pembangunan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010.

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana

penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010). Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Menurut Halim dan Kusufi (2012) rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian berdasarkan Susantih dan Saftiana (2009) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 1 sebagai berikut:

TABEL 1
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber : Mahsun, 2006 dalam Batafor, 2011

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2010) nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

TABEL 2
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	<75

Sumber : Mahmudi, 2010

3. Rasio Efisiensi

Menurut Kurniati (2012) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Hamzah, 2006 dalam Kurniati, 2012):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Nilai efisiensi diperoleh dari perbandingan sebagaimana di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Mahsun, 2006 dalam Batafor, 2011 dalam Tabel 3 berikut ini:

TABEL 3
Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤60
Efisien	>60-80
Cukup Efisien	>80-90
Kurang Efisien	>90-100
Tidak Efisien	≥100

Sumber : Mahsun, 2006 dalam Batafor, 2011

4. Rasio aktivitas (Rasio keserasian)

Menurut Halim dan Kusufi (2012) rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

5. Rasio pertumbuhan

Menurut Halim dan Kusufi (2012) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan berdasarkan Wahyuni (2010) sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin PAD } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan PAD } X_{n-1}}$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

3.3 Prosedur Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah ada dan tersedia di buku-buku literatur maupun sumber-sumber lain. Metode perolehan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini bersal dari data Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari 33 propinsi se-Indonesia periode 2008-2010. Data tersebut didapatkan melalui pencatatan ataupun *softcopy* atas data-data yang diperlukan yang diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id yang merupakan *website/*

situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Model dan Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2008-2010. Dalam penelitian ini teknik analisis rasio keuangan yang digunakan adalah:

a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

c. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

d. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin = $\frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin PAD } X_{n-1}}$

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan PAD } X_{n-1}}$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

2. Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Syarat normal tidaknya data terlihat dari probabilitas signifikansinya. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 maka data terdistribusi normal. Beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistik atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah:

a. Uji *One Way ANOVA* adalah pengujian lebih dari dua sampel.

Asumsi yang digunakan pada uji *One Way ANOVA*:

1. Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal
2. Varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama (*Homogeneity of variance*)
3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain

Kriteria uji asumsi *Homogenitas*:

Jika signifikan > 0,05 maka H_0 diterima (varian sama)

Jika signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak (varian berbeda)

Kriteria uji *One Way ANOVA*:

H_0 diterima apabila signifikansinya > 0,05

H_0 ditolak apabila signifikansinya < 0,05

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah propinsi se-Indonesia pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan menggunakan beberapa rasio, yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Selanjutnya rasio aktivitas dilihat dari rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, sedangkan pada rasio pertumbuhan dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan Σ pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan pertumbuhan belanja pembangunannya.

3.1.1 Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

TABEL 4
Rasio Kemandirian
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata	Klasifikasi	Peringkat
Aceh	10,36	12,17	11,44	11,32	R.Sekali	30
Sumatera Utara	67,62	62,76	65,75	65,38	Sedang	5
Sumatera Barat	45,83	36,51	52,41	44,92	Rendah	12
Riau	35,48	41,85	30,81	36,04	Rendah	18
Jambi	43,59	38,88	41,86	41,45	Rendah	14
Sumatera Selatan	44,28	43,97	42,53	43,59	Rendah	13
Bengkulu	26,7	31,47	35,08	31,09	Rendah	21
Lampung	51,76	49,38	53,47	51,53	Sedang	10
Bangka Belitung	35,02	30,66	38,69	34,79	Rendah	19
Kepulauan Riau	29,95	26,18	28,16	28,1	Rendah	25
DKI Jakarta	54,39	55,07	55,99	55,15	Sedang	8
Jawa Barat	72,51	71,64	74,44	72,86	Sedang	2
Jawa Tengah	71,08	70,23	72,21	71,18	Sedang	4
DI Jogjakarta	50,28	50,16	53,86	51,44	Rendah	11
Jawa Timur	73,67	72,92	74,93	73,84	Sedang	1
Banten	70,65	69,28	73,95	71,29	Sedang	3
Bali	63,44	61,19	62,28	62,3	Sedang	6
Nusa Tenggara Barat	40,33	40,22	40,51	40,35	Rendah	15
Nusa Tenggara Timur	25,08	24,98	27,4	25,82	Rendag	26
Kalimantan Barat	39,81	36,73	43,69	40,08	Rendah	16
Kalimantan Tengah	30,53	27,94	32,42	30,29	Rendah	22
Kalimantan Selatan	56,11	48,42	56,42	53,65	Rendah	9
Kalimantan Timur	33,79	41,29	38,54	37,87	Rendah	17
Sulawesi Utara	33,42	32,35	36,14	33,97	Rendah	20
Sulawesi Tengah	26,75	26,15	34,97	29,29	Rendah	23
Sulawesi Selatan	58,06	57,12	60,28	58,48	Sedang	7
Sulawesi Tenggara	30,97	21,65	32,16	28,26	Rendah	24
Gorontalo	17,61	18,29	22,44	19,45	R. Sekali	27
Sulawesi Barat	12,11	11,63	14,78	12,84	R. Sekali	29
Maluku	15,27	14,49	17,8	15,85	R. Sekali	28
Maluku Utara	11,14	10,69	11,19	11	R. Sekali	31
Papua Barat	5,09	2,61	3,69	3,8	R. Sekali	33
Papua	6,21	6,15	6,71	6,36	R. Sekali	3

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan pada Tabel 4 diatas, dapat dilihat rasio kemandirian keuangan daerah pada propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan begitupula sebaliknya.

Dapat dilihat bahwa Propinsi Jawa Timur menduduki tingkat kemandirian peringkat pertama, dengan nilai rata-rata 73,84% yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada Propinsi Jawa Timur memberikan kontribusi yang paling besar bagi total pendapatan daerahnya. Sedangkan Propinsi Papua Barat menduduki peringkat terakhir dari 33 propinsi, dengan nilai rata-rata 3,80%. Hal ini dikarenakan Propinsi Papua Barat adalah propinsi baru, pajak dan retribusi Propinsi Papua Barat pun masih sangat rendah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat sangat rendah.

Tingkat kemandirian propinsi se-Indonesia periode 2008-2010 masih rendah dilihat dari rata-rata 33 propinsi yaitu sebesar 39,20%. Dan apabila dihubungkan dengan Tabel 1 mengaju kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahsun, 2006 dalam Batafor, 2011 persentasenya terletak antara >25-50%, dengan demikian rasio kemandirian propinsi se-Indonesia tergolong dalam kategori kemandirian rendah dengan pola hubungan yang konsultatif. Hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, setiap daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

4.1.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

TABEL 5
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata	Klasifikasi	Peringkat
Aceh	90,02	92,38	100,18	94,19	C. Efektif	29
Sumatera Utara	114,96	95,81	114,74	108,5	S. Efektif	22
Sumatera Barat	140,51	102,21	119,02	120,58	S. Efektif	13
Riau	135,61	105,97	100,69	114,09	S. Efektif	20
Jambi	154,1	109,6	136,29	133,33	S. Efektif	7
Sumatera Selatan	118,16	89,99	91,61	99,92	C. Efektif	26
Bengkulu	117,68	68,24	79,29	88,4	K. Efektif	32
Lampung	125,96	107,7	131,03	121,56	S. Efektif	12
Bangka Belitung	139,77	96,68	122,78	119,75	S. Efektif	15
Kepulauan Riau	78,1	89,94	130,21	99,42	C. Efektif	27
DKI Jakarta	100,71	95,21	109,02	101,65	S. Efektif	25
Jawa Barat	130,08	107,75	128,98	122,27	S. Efektif	11
Jawa Tengah	109,91	110,37	128,32	116,2	S. Efektif	18
DI Jogjakarta	127,02	108,09	119,05	118,05	S. Efektif	16
Jawa Timur	145,43	146,85	145,38	145,89	S. Efektif	2
Banten	121,48	110,56	144,42	125,49	S. Efektif	9
Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata	Klasifikasi	Peringkat

Bali	144,5	136,76	138,8	140,02	S. Efektif	4
Nusa Tenggara Barat	123,01	100,81	97,38	107,07	S. Efektif	23
Nusa Tenggara Timur	116,17	114,22	120,24	116,88	S. Efektif	17
Kalimantan Barat	133,82	112,56	123,27	123,22	S. Efektif	10
Kalimantan Tengah	113,1	76,06	71,1	86,76	K. Efektif	33
Kalimantan Selatan	151,32	119,68	117,99	129,66	S. Efektif	8
Kalimantan Timur	164,63	139,02	131,1	144,91	S. Efektif	3
Sulawesi Utara	135	106,9	119,63	120,51	S. Efektif	14
Sulawesi Tengah	152,38	118,73	148	139,7	S. Efektif	5
Sulawesi Selatan	111,26	95,48	108,08	104,94	S. Efektif	24
Sulawesi Tenggara	135,01	47,17	93,93	92,04	C. Efektif	30
Gorontalo	155,47	133,32	128,92	139,23	S. Efektif	6
Sulawesi Barat	132,51	100,7	109,74	114,32	S. Efektif	19
Maluku	96,12	92,69	86,4	91,74	C. Efektif	31
Maluku Utara	128,54	90,9	76,52	98,65	C. Efektif	28
Papua Barat	254,97	113,4	167,21	178,52	S. Efektif	1
Papua	114,67	107,04	106,21	109,31	S. Efektif	21

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektivitas, untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Analisis rasio efektifitas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Propinsi yang termasuk dalam klasifikasi sangat efektif adalah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Dan propinsi yang termasuk dalam klasifikasi cukup efektif yaitu

Propinsi Aceh, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara. Ada dua klasifikasi Propinsi yang kurang efektif yaitu Propinsi Bengkulu sebesar 88,40% dan Kalimantan Tengah 86,76%. Propinsi Papua Barat berada pada peringkat pertama, dalam merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan untuk tahun 2008-2010 yaitu sebesar 178,52% sedangkan peringkat terakhir adalah Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 86,76%.

4.1.3. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

TABEL 6
Rasio Efisiensi
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata	Klasifikasi	Peringkat
Aceh	82,69	126,49	108,05	105,74	T. Efisien	32
Sumatera Utara	91,99	107,22	94,37	97,86	K. Efisien	14
Sumatera Barat	95,01	81,8	116,59	97,8	K. Efisien	13
Riau	87,83	116,26	98,17	100,75	T. Efisien	22
Jambi	97,81	113,01	90,73	100,52	T. Efisien	21
Sumatera Selatan	92,71	97,65	96,4	95,59	K. Efisien	6
Bengkulu	115,44	101,98	97,04	104,82	T. Efisien	31
Lampung	99,3	106,01	95,85	100,39	T. Efisien	20
Bangka Belitung	92,29	106,14	101,73	100,05	T. Efisien	19
Kepulauan Riau	84,69	126,69	92,99	101,46	T. Efisien	24
DKI Jakarta	83,01	101,29	93,6	92,64	K. Efisien	2
Jawa Barat	84	105,24	92,59	93,94	K. Efisien	4
Jawa Tengah	99,22	91,28	90,07	93,52	K. Efisien	3
DI Jogjakarta	115,47	103,22	98,57	105,75	T. Efisien	33
Jawa Timur	87,68	97,12	102,26	95,69	K. Efisien	7
Banten	95,86	99,37	90,29	95,17	K. Efisien	5
Bali	87,82	95,21	88,74	90,59	K. Efisien	1
Nusa Tenggara Barat	97,77	93,78	100,28	97,28	K. Efisien	12
Nusa Tenggara Timur	104,04	100,19	105,52	103,25	T. Efisien	30
Kalimantan Barat	92,32	103,11	95,57	97	K. Efisien	11
Kalimantan Tengah	102,37	107,6	94,98	101,65	T. Efisien	25
Kalimantan Selatan	82,4	99,8	105,72	95,97	K. Efisien	9
Kalimantan Timur	103,74	117,95	84,02	101,9	T. Efisien	26
Sulawesi Utara	94,7	101,08	98,17	97,98	K. Efisien	15
Sulawesi Tengah	91,58	100,7	95,72	96	K. Efisien	10
Sulawesi Selatan	100,04	97,54	96,96	98,18	K. Efisien	16
Sulawesi Tenggara	93,88	108,63	106,68	103,07	T. Efisien	29
Gorontalo	100,11	110,36	95,56	102,01	T. Efisien	27
Sulawesi Barat	101,85	106,48	99,56	102,63	T. Efisien	28
Maluku	99,28	100,7	99,75	99,91	K. Efisien	18
Maluku Utara	95,41	110,75	98,12	101,43	T. Efisien	23
Papua Barat	109,6	96,34	91,11	99,02	K. Efisien	17
Papua	99,89	88,05	99,8	95,91	K. Efisien	8

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Propinsi yang menduduki peringkat pertama adalah Propinsi Bali dengan rasio efisiensi sebesar 90,59% apabila dihubungkan dengan Tabel 2.4 kriteria efisiensi keuangan daerah yaitu mengaju kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahsun, 2006 dalam Batafor, 2012 maka persentasenya antara >90 – 100%, dengan demikian rasio efisiensi kategori kurang efisien. Sedangkan diperingkat terakhir adalah Propinsi DI Jogjakarta sebesar 105,75% dengan kriteria tidak efisien apabila dilihat dari Tabel 3 dengan persentasenya $\geq 100\%$. Dari hasil perhitungan di atas tidak ada propinsi yang termasuk dalam kriteria yang sangat efisien. Berarti

propinsi se-Indonesia masih belum efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

4.1.4 Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Hasil perhitungan rasio aktivitas propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

TABEL 7
Rasio Aktivitas
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Keterangan	Belanja Rutin				Belanja Pembangunan			
	2008	2009	2010	Rata-rata	2008	2009	2010	Rata-rata
Aceh	20,24	41,16	33,89	31,77	62,45	85,32	74,16	73,98
Sumatera Utara	55,63	64,32	51,25	57,06	36,36	42,91	43,11	40,79
Sumatera Barat	52,58	37,99	53,71	48,09	42,43	43,8	62,89	49,71
Riau	35,08	50,77	37,58	41,14	52,74	65,5	60,59	59,61
Jambi	35,63	50,61	40,99	42,41	62,19	62,4	49,74	58,11
Sumatera Selatan	39,45	43,75	36,2	39,8	53,26	53,9	60,2	55,79
Bengkulu	29,27	42,98	52,12	41,46	86,17	59	44,92	63,36
Lampung	61,64	60,45	46,3	56,13	37,67	45,56	49,55	44,26
Bangka Belitung	44,62	55,62	44,8	48,34	47,67	50,52	56,94	51,71
Kepulauan Riau	27,87	32,82	28,34	29,68	56,83	93,87	64,64	71,78
DKI Jakarta	32,26	32,46	30,28	31,67	50,75	68,83	63,32	60,97
Jawa Barat	62,45	73,1	64,32	66,62	21,54	32,13	28,28	27,32
Jawa Tengah	64,57	56,39	57,29	59,42	34,64	34,9	32,77	34,1
DI Jogjakarta	72,76	54,19	57,38	61,44	42,71	49,03	41,19	44,31
Jawa Timur	61,09	55,17	58,81	58,36	26,59	41,94	43,45	37,33
Banten	49,56	48,18	41,56	46,43	46,3	51,19	48,73	48,74
Bali	61,45	67,87	66,86	65,39	26,37	27,34	21,88	25,2
Nusa Tenggara Barat	55,67	61,74	67,54	61,65	42,1	32,04	32,73	35,62

Keterangan	Belanja Rutin				Belanja Pembangunan			
	2008	2009	2010	Rata-rata	2008	2009	2010	Rata-rata
Nusa Tenggara Timur	51,34	48,15	49,48	49,65	52,7	52,04	56,04	53,59
Kalimantan Barat	38,1	47,59	43,52	43,07	54,22	55,52	52,05	53,93
Kalimantan Tengah	33,78	36,29	40,04	36,7	68,58	71,3	54,94	64,94
Kalimantan Selatan	40,81	45,64	50,12	45,52	41,6	54,17	55,6	50,45
Kalimantan Timur	62,1	69,93	41,69	57,9	41,64	48,03	42,33	44
Sulawesi Utara	51,61	50,67	54,55	52,28	43,08	50,41	43,62	45,71
Sulawesi Tengah	39,74	44,41	42,86	42,34	51,85	56,29	52,87	53,67
Sulawesi Selatan	61,99	56,85	58,52	59,12	38,05	40,69	38,44	39,06
Sulawesi Tenggara	46,85	43,3	56,66	48,93	47,03	65,34	50,03	54,13
Gorontalo	34,37	37,42	43,49	38,43	65,75	72,94	52,07	63,59
Sulawesi Barat	21,12	18,73	20,58	20,14	80,73	87,76	78,97	82,48
Maluku	46,63	38,11	39,75	41,5	52,65	62,59	60	58,41
Maluku Utara	39,64	34,02	34,92	36,19	55,77	76,74	63,2	65,23
Papua Barat	39,2	50,35	44,71	44,75	70,4	45,99	46,4	54,26
Papua	66,23	49,26	48,89	54,79	33,66	38,79	50,92	41,12

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa tahun 2008-2010 rata-rata belanja pembangunan yang lebih besar dari belanja rutinnya adalah Propinsi Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dari beberapa propinsi yang rata-rata belanja pembangunannya lebih besar dari belanja rutin, terlihat Sulawesi Barat lebih menonjol rata-rata belanja pembangunannya dibandingkan belanja rutin yaitu sebesar 82,48% sedangkan rata-rata belanja rutinnya sebesar 20,14%. Dan untuk propinsi yang rata-rata biaya rutinnya lebih besar dari belanja pembangunan adalah Propinsi Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

3.1.2 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin PAD } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan PAD } X_{n-1}}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD Propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

TABEL 8
Rasio Pertumbuhan (Pendapatan Asli Daerah)
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
Aceh	21,92	2,64	8,4	10,99
Sumatera Utara	28,78	-7,58	26,72	15,97
Sumatera Barat	38,22	-6,37	36,1	22,65
Riau	17,54	-8,47	-0,97	2,7
Jambi	38,81	-15,92	30,43	17,77
Sumatera Selatan	34,43	-7,5	30,04	18,99
Bengkulu	37,81	-0,45	22	19,79
Lampung	32,18	-3,52	29,99	19,55
Bangka Belitung	44,53	-16,11	32,95	20,46
Kepulauan Riau	25,01	-5,99	36,67	18,56
DKI Jakarta	19,75	1,39	21,61	14,25
Jawa Barat	24,95	5,74	30,02	20,24
Jawa Tengah	26,12	8,16	19,61	17,96
DI Jogjakarta	29,45	1,94	14,73	15,37
Jawa Timur	25,17	9,51	31,02	21,9
Banten	27,93	1,6	37,56	22,36
Bali	26,76	10,04	19,74	18,85
Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
Nusa Tenggara Barat	30,86	9,71	9,18	16,59
Nusa Tenggara Timur	19,66	7,75	16,61	14,68
Kalimantan Barat	24,5	-1,23	34,11	19,12
Kalimantan Tengah	39,35	0,36	31,99	23,9
Kalimantan Selatan	52,44	-2,96	25,92	25,14
Kalimantan Timur	49,83	6,67	22,94	26,48
Sulawesi Utara	27,84	2,64	26,47	18,98
Sulawesi Tengah	43,6	-1,31	49,64	30,64

Sulawesi Selatan	24,84	0,33	24,37	16,51
Sulawesi Tenggara	69,62	-24,77	52,09	32,31
Gorontalo	34,87	8,59	29,74	24,4
Sulawesi Barat	31,45	4,19	39,98	25,2
Maluku	14,93	21,78	15,99	17,57
Maluku Utara	31,92	-2,72	6,21	11,81
Papua Barat	133,23	-3,75	70,85	66,78
Papua	3,57	3,35	2,79	3,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat pada tahun 2009 pertumbuhan PAD secara merata propinsi se-Indonesia mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya. Ada dua propinsi yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tiga tahun yaitu Propinsi Riau dan Sulawesi Selatan, sedangkan propinsi lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun selama tiga tahun.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

TABEL 9
Rasio Pertumbuhan (Pendapatan Daerah)
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
Aceh	129,44	-12,58	15,31	44,06
Sumatera Utara	20,11	-0,41	20,95	13,55
Sumatera Barat	34,52	17,55	-5,2	15,62
Riau	22,03	-22,4	34,5	11,38
Jambi	24,32	-5,74	21,15	13,24
Sumatera Selatan	20,54	-6,87	34,47	16,05
Bengkulu	41,43	-15,53	9,46	11,78
Lampung	25,39	1,12	20,05	15,52
Bangka Belitung	37,75	-4,2	5,37	12,97
Kepulauan Riau	33,35	7,55	27,05	22,65
DKI Jakarta	15,32	0,16	19,6	11,69
Jawa Barat	21,08	7,02	25,13	17,74
Jawa Tengah	19,25	9,48	16,32	15,02
Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
DI Jogjakarta	-3,68	2,18	6,85	1,78
Jawa Timur	19,11	10,64	27,5	19,08
Banten	23,18	3,6	28,87	18,55
Bali	21,88	14,09	17,64	17,87
Nusa Tenggara Barat	23,58	10,01	8,41	14
Nusa Tenggara Timur	8,04	8,19	6,31	7,51
Kalimantan Barat	24,31	7,03	12,74	14,69
Kalimantan Tengah	17,1	9,67	13,75	13,51

Kalimantan Selatan	35,43	12,45	8,08	18,65
Kalimantan Timur	36,18	-12,71	31,7	18,39
Sulawesi Utara	19,55	6,03	13,22	12,93
Sulawesi Tengah	31,52	0,94	11,9	14,79
Sulawesi Selatan	17,91	1,97	17,85	12,58
Sulawesi Tenggara	35,04	7,61	2,37	15,01
Gorontalo	2,87	4,59	5,74	4,4
Sulawesi Barat	39,64	8,51	10,13	19,43
Maluku	-13,72	28,28	-5,56	3
Maluku Utara	24,27	1,36	1,47	9,03
Papua Barat	118,63	87,83	20,73	75,73
Papua	-2,39	4,44	-5,84	-1,26

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 9 ada dua propinsi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya selama tiga tahun yaitu Propinsi DI Jogjakarta sebesar -3,68%, 2,18% dan 6,85% dan Gorontalo sebesar 2,87%, 4,59% dan 5,74% naiknya secara perlahan. Sebaliknya propinsi yang mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 yaitu Propinsi Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Propinsi lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun selama tiga tahun dari tahun 2008-2009 dalam memepertahankan dan meningkatkan keberhasilan pendapatan daerah.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja rutin propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

TABEL 10
Rasio Pertumbuhan (Belanja Rutin)
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010
(Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
Aceh	-18,01	77,77	-5,07	18,23
Sumatera Utara	32,69	15,15	-3,62	14,74
Sumatera Barat	36,51	-15,06	34,02	18,49
Riau	14,08	12,29	-0,43	8,65
Jambi	56,57	33,9	-1,88	29,53
Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
Sumatera Selatan	20,87	3,29	11,26	11,81
Bengkulu	15,01	24,03	32,73	23,92
Lampung	38,52	-0,82	-8,06	9,88
Bangka Belitung	35,96	19,41	-15,13	13,41
Kepulauan Riau	14,34	26,65	9,72	16,9
DKI Jakarta	0,42	0,76	11,59	4,26
Jawa Barat	16,53	25,27	10,08	17,3
Jawa Tengah	37	-4,4	18,19	16,93

DI Jogjakarta	55,73	-23,9	13,14	14,99
Jawa Timur	40,66	-0,08	35,91	25,5
Banten	22,23	0,73	11,15	11,37
Bali	24,22	26	15,9	22,04
Nusa Tenggara Barat	56,83	22,01	18,6	32,48
Nusa Tenggara Timur	44,52	1,47	9,24	18,41
Kalimantan Barat	6,1	33,72	3,09	14,3
Kalimantan Tengah	26,36	17,81	25,49	23,22
Kalimantan Selatan	62,34	25,77	18,68	35,6
Kalimantan Timur	91,47	-1,7	-21,48	22,76
Sulawesi Utara	27,8	4,09	21,9	17,93
Sulawesi Tengah	25,22	12,83	7,99	15,34
Sulawesi Selatan	26,4	-6,48	21,31	13,74
Sulawesi Tenggara	55,96	-0,56	33,96	29,79
Gorontalo	43,95	13,88	22,9	26,91
Sulawesi Barat	72,44	-3,8	21,06	29,9
Maluku	39,78	4,85	-1,5	14,38
Maluku Utara	3,44	-13,03	4,16	-1,81
Papua Barat	123,18	141,27	7,2	90,55
Papua	13,38	-22,32	-6,56	-5,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan hasil Tabel 10 menghasilkan pertumbuhan belanja rutin dari tahun 2008-2010, maka dapat dilihat ada propinsi yang mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 yaitu Propinsi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Sebaliknya propinsi yang mengalami kenaikan dari tahun 2008-2010 adalah Propinsi Bengkulu dan DKI Jakarta. Propinsi lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, selama tiga tahun periode 2008-2009.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja pembangunan propinsi se-Indonesia tahun 2008-2010 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

TABEL 11
Rasio Pertumbuhan (Belanja Pembangunan)
Propinsi Se-Indonesia Tahun 2008-2010
(Dalam Persen)

Keterangan	2008	2009	2010	Rata-rata
Aceh	163,83	19,44	0,23	61,17
Sumatera Utara	-2,33	17,51	21,54	12,24
Sumatera Barat	26,66	21,36	36,1	28,04
Riau	-10,19	-3,64	24,43	3,53
Jambi	14,73	-5,41	-3,44	1,96

Sumatera Selatan	-7,29	-5,75	50,19	12,38
Bengkulu	139,65	-42,17	-16,67	26,94
Lampung	-13,3	22,3	30,58	13,19
Bangka Belitung	25,92	1,53	18,74	15,4
Kepulauan Riau	-18,59	77,66	-12,51	15,52
DKI Jakarta	-8,61	35,84	10,02	12,42
Jawa Barat	8,63	59,62	10,11	26,12
Jawa Tengah	24,59	10,29	9,23	14,7
DI Jogjakarta	37,85	17,31	-10,22	14,98
Jawa Timur	-14,28	74,5	32,09	30,77
Banten	19,13	14,54	22,68	18,79
Bali	1,21	18,3	-5,86	4,55
Nusa Tenggara Barat	-5,22	-16,28	10,76	-3,58
Nusa Tenggara Timur	-13,17	6,83	14,47	2,71
Kalimantan Barat	31,7	9,59	5,71	15,67
Kalimantan Tengah	32,52	14,02	-12,35	11,4
Kalimantan Selatan	-3,29	46,44	10,94	18,03
Kalimantan Timur	-5,71	0,69	16,07	3,68
Sulawesi Utara	8,05	24,07	-2,04	10,03
Sulawesi Tengah	45,76	9,59	5,1	20,15
Sulawesi Selatan	3,12	9,04	11,34	7,83
Sulawesi Tenggara	-4,42	49,49	-21,61	7,82
Gorontalo	6,53	16,03	-24,51	-0,65
Sulawesi Barat	45,43	17,96	-0,89	20,83
Maluku	10,58	52,51	-9,47	17,88
Maluku Utara	37,99	39,48	-16,44	20,35
Papua Barat	147,87	22,7	21,81	64,13
Papua	-11,56	20,36	23,61	10,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat pertumbuhan belanja pembangunan dari tahun 2008-2010, sehingga dapat melihat tingkat kemampuan setiap propinsi dalam memperathankan dan meningkatkan belanja pembangunan. Propinsi yang mengalami penurunan dalam waktu tiga tahun dari tahun 2008-2010 yaitu Sumatra Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua, sebaliknya propinsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 adalah Propinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Propinsi lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, selama periode 2008-2009.

3.2 Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut:

TABEL 12
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Aktivitas_B.Rutin	Rasio Aktivitas_B.Pembangunan	Rasio Pertumbuhan_PAD	Rasio Pertumbuhan_Pendapatan	Rasio Pertumbuhan_B.Rutin	Rasio Pertumbuhan_B.Pembangunan
N		99	99	99	99	99	99	99	99	99
Normal Parameters ^a	Mean	392.012	1.171.747	989.535	472.184	517.357	203.546	160.895	198.873	163.564
	Std. Deviation Absolute	2.014.533	2.623.509	886.072	1.223.948	1.465.053	2.157.004	2.189.820	2.692.694	3.191.194
Most Extreme Differences	Positive	.054	.069	.089	.043	.078	.091	.144	.138	.166
	Negative	.054	.060	.089	.043	.078	.091	.144	.138	.166
		-.054	-.069	-.039	-.043	-.044	-.060	-.098	-.082	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.540	.685	.881	.430	.780	.901	1.429	1.375	1.650
Asymp. Sig. (2-tailed)		.932	.737	.420	.993	.577	.391	.034	.046	.009

Berdasarkan Tabel 12 hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *asympt sig* > 0,05 yaitu rasio kemandirian sebesar 0,932, rasio efektivitas sebesar 0,737, rasio efisiensi sebesar 0,420, rasio aktivitas belanja rutin sebesar 0,993, rasio aktivitas pembangunan sebesar 0,577 dan rasio pertumbuhan PAD sebesar 0,391 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal yang nilai *asympt sig* < 0,05 yaitu rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 0,034, rasio pertumbuhan belanja rutin sebesar 0,046 dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 0,009.

Berdasarkan uji normalitas tersebut, data yang berdistribusi normal menggunakan uji *One Way ANOVA* adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja rutin, rasio aktivitas belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan PAD. Sedangkan data yang tidak berdistribusi normal menggunakan uji *Kruskal Wallis* yaitu rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan.

Sebelum dilakukan uji *One Way ANOVA* dilakukan uji asumsi *Homogenitas* untuk mengetahui apakah varians dari populasi-populasi tersebut sama atau berbeda. Hasil uji *Homogenitas* sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Uji asumsi Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Rasio Kemandirian	2.653	32	66	.000
Rasio Efektivitas	2.760	32	66	.000
Rasio Efisiensi	2.303	32	66	.002
Rasio Aktivitas_B.Rutin	2.369	32	66	.002
Rasio Aktivitas_B.Pembangunan	3.055	32	66	.000
Rasio Pertumbuhan_PAD	2.448	32	66	.001

Dari Tabel 13 uji asumsi *Homogenitas* diperoleh rasio kemandirian nilai Sig. = 0,000, rasio efektivitas sebesar 0,000, rasio efisiensi sebesar 0,002, rasio aktivitas belanja rutin sebesar 0,002, rasio aktivitas belanja pembangunan sebesar 0,000 dan rasio pertumbuhan PAD sebesar 0,001. Nilai signifikansi dari semua ini jauh dibawah kriteria 0,05 Ho ditolak karena < 0.05. Karena tidak memenuhi syarat dari uji *One Way ANOVA* maka alat uji statistik semua data menggunakan uji *Kruskal Wallis*. Hasil uji *Kruskal Wallis* dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:

TABEL 14
Hasil Uji Statistik Kruskal Wallis

	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Aktivitas_B.Rutin	Rasio Aktivitas_B.Pembangunan	Rasio Pertumbuhan_PAD	Rasio Pertumbuhan_Pendapatan	Rasio Pertumbuhan_B.Rutin	Rasio Pertumbuhan_B.Pembangunan
Chi-Square	95.738	57.184	21.173	79.310	78.517	14.276	22.107	22.180	18.314
df	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Asymp. Sig.	.000	.004	.928	.000	.000	.997	.905	.903	.975

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Propinsi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *Kruskal Wallis* diperoleh rasio kemandirian nilai Sig. = 0,000, rasio efektivitas nilai Sig. = 0.004, rasio aktivitas belanja rutin nilai Sig. = 0,000, rasio aktivitas pembangunan nilai Sig. = 0,000. Nilai signifikansi dari semua ini, jauh dibawah kriteria 0,05 maka Ho ditolak. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas belanja rutin dan rasio aktivitas belanja pembangunan terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H1, H2, H4, dan H5 diterima.

Sedangkan rasio efisiensi nilai Sig. = 0.928, rasio pertumbuhan PAD nilai Sig. = 0,997, rasio pertumbuhan pendapatan nilai Sig. = 0,905, rasio pertumbuhan belanja rutin nilai Sig. = 0,903 dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan nilai Sig. = 0,975. Nilai signifikansi dari semua ini, di atas kriteria 0,05 maka Ho diterima. Rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H3, H6, H7, H8, dan H9 ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan hasil penelitian bahwa Propinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dan Propinsi Papua Barat berada pada peringkat terakhir. Terdapat perbedaan tingkat kemandirian yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H1 diterima.
2. Rasio efektivitas untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD, Propinsi Papua Barat berada pada peringkat pertama dan peringkat terakhir adalah Propinsi Kalimantan Tengah. Terdapat perbedaan tingkat efektivitas yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H2 diterima.
3. Rasio efisiensi untuk melihat tingkat efisien kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, Propinsi Bali diperingkat

pertama dan diperingkat terakhir adalah Propinsi DI Jogjakarta. Tidak terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H3 ditolak.

4. Rasio aktivitas untuk melihat pemda dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, rata-rata selama tiga tahun tersebut dapat dipastikan bahwa daerah yang lebih mengutamakan belanja pembangunannya dibandingkan dengan belanja rutinnya adalah Propinsi Sulawesi Barat. Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja rutin dan aktivitas belanja pembangunan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H4 dan H5 diterima.

5. Rasio Pertumbuhan mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

- Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2009 secara merata propinsi se-Indonesia mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PAD yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H6 ditolak.

- Rasio pertumbuhan pendapatan, dua propinsi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu Propinsi DI Jogjakarta dan Gorontalo, sebaliknya propinsi yang mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 yaitu Propinsi Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat propinsi yang lainnya berfluktuasi. Tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H7 ditolak.

- Rasio pertumbuhan belanja rutin propinsi yang mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 yaitu Sumatra Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Sebaliknya propinsi yang mengalami kenaikan dari tahun 2008-2010 adalah Bengkulu dan DKI Jakarta propinsi yang lainnya berfluktuasi. Tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan belanja rutin yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi

se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H8 ditolak.

- Rasio pertumbuhan belanja pembangunan propinsi yang mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 yaitu Sumatra Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua, sebaliknya propinsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 adalah Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat propinsi yang lainnya berfluktuasi. Tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan belanja pembangunan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia periode 2008-2010, sehingga H9 ditolak.

KETERBATASAN

Dalam penelitian ini, peneliti sangat menyadari bahwa temuan-temuan yang dihasilkan belum secara sempurna menjawab semua permasalahan yang dibahas. Terdapat banyak keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu:

- 1) Periode waktu yang relatif pendek yaitu 3 tahun, hal ini menjadikan analisis permasalahan kurang sempurna karena pembahasan suatu proses memerlukan periode waktu yang cukup.
- 2) Metode pengukuran dalam analisis rasio keuanagn daerah yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode pengukuran sehingga menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik lagi.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik adalah:

1. Bagi pemerintah daerah propinsi se-Indonesia diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah secara lebih intensif dan aktif, dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan

menggunakan rasio keuangan diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Batafor, G. G. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT*. Tesis, Universitas Udayana Denpasar.
<http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf/thesis/unud-434-976970535-tesis.pdf> accessed Oct 29, 2012.
- Ekawarna. S. U, Sam. I dan Rahayu. S. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Vol.1 No.1, hal 49-66.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPF Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hendriyadi, S. 2011. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Antara Tahun 2008–2009*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
<http://eprints.undip.ac.id/29541/1/Skripsi005.pdf> accessed Oct 23, 2012.
- Kurniati, S. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
[http://eprints.undip.ac.id/35659/1/Skripsi SIT1.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35659/1/Skripsi_SIT1.pdf) accessed Oct 29, 2012.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. *Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Kementerian Negara PPN/ Bappenas. Jakarta.
<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7621/> accessed Nov 27, 2012.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ronald, A dan Sarmiyatiningsih, D. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 1 No.1, Juni 2010, 31-42.

Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 12*.

Wahyuni, N. 2010. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *EL-Muhasaba*, (Vol.1 No.1; 01-2010). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/1879/pdf> accessed Oct 29, 2012.